

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Nafa Maulida Lestari, Hanafi Arief, Nasrullah

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arrsyad Al Banjari  
Banjarmasin, NIM19810532

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arrsyad Al Banjari  
Banjarmasin, NIDN0004085801

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arrsyad Al Banjari  
Banjarmasin, NIDN1112058204

Email : [nafamualida.1023@gmail.com](mailto:nafamualida.1023@gmail.com)

## ABSTRAK

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan hukum pelanggaran lalu lintas membutuhkan konsep yang matang dan organisasi yang baik agar dapat berjalan lancar. Beberapa aspek dalam manajemen lalu lintas perlu diperhatikan, seperti regulasi lalu lintas, penegakan hukum, infrastruktur jalan, dan sistem transportasi umum. Ada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat daftar pelanggaran dan sanksi yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan. Pelaksanaannya melibatkan proses hukum dengan keterlibatan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tinggi. Pemerintah juga memiliki peranan penting dalam menangani permasalahan lalu lintas. Tujuan utama pemerintah adalah mewujudkan lalu lintas jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, nyaman dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan dalam lalu lintas melalui penyebaran informasi serta melakukan Pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, pengendara, lalu lintas

## ABSTRACT

The government aims to create safe, secure, fast, smooth, orderly and orderly, comfortable and efficient traffic and road transportation through traffic management and traffic engineering. This research uses normative legal research methods, namely library research methods. Normative legal research methods or library legal research methods are methods or methods used in legal research which are carried out by examining existing library materials.

From this research, the results obtained show that the application of traffic violation laws requires a mature concept and good organization so that it can run smoothly. Several aspects of traffic management need to be considered, such as traffic regulations, law enforcement, road infrastructure and public transportation systems. The Road Traffic and Transportation Law contains a list of violations and sanctions that must be obeyed by road users. Its implementation involves a legal process with the involvement of the police, prosecutor's office and high court. The government also has an important role in dealing with traffic problems. The government's main goal is to create safe, secure, fast, smooth, comfortable and efficient road traffic.

Efforts that have been made include increasing public awareness about traffic safety through disseminating information and developing better transportation infrastructure.

Keywords: Law enforcement, motorists, traffic

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Aliviameita, A., & Puspitasari. (2020). Buku Ajar Mata Kuliah.

### Peraturan Perundang Udangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### Jurnal:

AHDI, W. (2019). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi

Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar

Banda Aceh ).

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi

Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145-160.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Denico Doly. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Kajian*, 20(3), 219.

Gultom, T. S., & Anda. (2012). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

Indonesia, R. (2013). Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2011 - 2035.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. (2007). PENEGAKAN HUKUM. *Writer*, 48(Tabel 1), 1-2.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 91-96.

Sumampow, A. (2013). Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Ber Lalu Lintas. *Lex Crimen*, 2(7), 63-73.

Walean, A. A., Kaunang, M., & Kimbal, M. L. (2019). Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Manado Provinsi Sulawesi. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), 15-25.

### Website:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> diakses pada tanggal 11 Juni 2023

